

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**PUTUSAN REHABILITASI DALAM KONSEP
PEMIDANAAN DI INDONESIA**



**Oleh:
Yansen Dau, S.H.
NIM.031324453067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

TESIS

**PUTUSAN REHABILITASI DALAM KONSEP
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Minat Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



**Oleh:
Yansen Dau, S.H.
NIM. 031324453067**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal, 7 Desember 2015**

**Oleh
Dosen Pembimbing,**



**Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 19680303 199203 2 002**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 196504191990021001**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal, 7 Desember 2015

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

Anggota :

- 1. Dr. Astutik, S.H., M.H.**
- 2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**
- 3. Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Hari, Tanggal : Senin, 7 Desember 2015
Ruang : 108 (Gedung B Fakultas Hukum)
Pukul : 14.00 WIB
Nama Mahasiswa : Yansen Dau, S.H.
NIM : 031324153067
Judul : Putusan Rehabilitasi Dalam Konsep Pemidanaan
Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 5 Desember 2015

Yang membuat pernyataan,



Yansen Dau, S.H.
NIM. 031324153067

ABSTRAK

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan sanksi rehabilitasi. Tujuan pemindaan dalam tindak pidana pengguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalah guna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tujuan penelitian menganalisa konsep rehabilitasi dalam perundang-undangan di Indonesia dan kedudukan putusan rehabilitasi dalam konsep pemidanaan di Indonesia Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi rehabilitasi hal ini penentuan tersebut berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009. Putusan hakim mengacu pada aturan dan peraturan, padahal menurut adalah sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)” berjalan secara integral, simultan dan paralel artinya satu kesatuan yang harus selaras. Salah satu bentuk nyata dari Restoratif Justice yang telah dianut dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah penerapan sistem rehabilitasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah diwajibkan dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Kata kunci: Penggunaan narkoba, restoratif justice, putusan rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial

ABSTRACT

The application of legal sanctions for perpetrators of narcotics can be sanctioned by rehabilitation. The saction of perpetrators of narcotics or drug users as mantioned in Article 127 of Law No. 35 of 2009 should be done selectively in respect of whether the perpetrator is a user or dealer. The selective action should also applied in Article 127 of Law No. 35 of 2009 that imposed criminal sanctions for level I to III as a victim. So perpetrators of narcotics has rights to medical and social rehabilitation. Application of medical and social rehabilitation is mantioned in Article 127 paragraph (3) of Act 35 of 2009. This research objective is to analyze the concept of rehabilitation in the Indonesian legislation and the law perspective of rehabilitation based on Indonesian legislation. Both of the sanctions for perpetrators of narcotics or drug addicts, whether to apply penal sanctions or rehabilitation of such determination it is depend on the judges decision. Because under the provisions of the narcotics law, judges are given the authority to determine and impose imprisonment or rehabilitation for drug addicts, in accordance with the provisions of Article 127 and Article 103 of Law No. 35 of 2009. The judge's decision refers to the rules and regulations, but according to the legal system is to distinguish between the rules and regulations, structures, institutions and processes that exist in the system. The application of law in a system is determined by three elements, namely the legal structure ((legal strukture), the substance of the law (legal substance), and the legal culture (legal culture), all of three must running integrally, simultaneous and parallel. It means all in one unit that must be aligned. Again, one of the real form of Restorative Justice which has been adopted in Law No. 35 of 2009 is the implementation of the rehabilitation system. Based on Article 54 of Law No. 35 of 2009 is required to do the medical rehabilitation and social rehabilitation for the perpetrators of narcotics in Indonesian.

Keywords: Perpetrators of narcotics, restorative justice, medical and social rehabilitation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, **“Putusan Rehabilitasi Dalam Konsep Pemidanaan Di Indonesia”** Selama penulisan tesis ini banyak sekali mendapat bantuan yang amat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H. M.H., selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.
4. Ibu Astutik, S.H, M.H., selaku dosen Pembimbing dan MKPT yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., MS., selaku ketua penguji tesis yang telah memberikan dukungan, saran dan pendapat dengan segala ketulusan.
6. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku penguji yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan.
7. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., selaku penguji dan pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) yang telah memberikan dukungan dan bantuan dengan segala ketulusan.

8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dengan tulus dalam hal penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran sangatlah diharapkan demi terciptanya penulisan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa mendatang.

Surabaya, Desember 2015

Yansen Dau, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 tentang Pemakai Narkoba Ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
PERYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.6 Metode Penelitian.....	24
1.6.1 Tipe Penelitian	24
1.6.2 Pendekatan penelitian.....	25
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	25
1.7 Sistematika Penulisan.....	26

BAB II KONSEP REHABILITASI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35

TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI INDONESIA

2.1	Pengertian Konsep Rehabilitasi.....	28
2.1.1	Rehabilitasi Narkotika	33
2.2	Konsep Rehabilitas Berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	47
 BAB III KEDUDUKAN PUTUSAN REHABILITASI DALAM KONSEP PEMIDANAAN DI INDONESIA		
3.1	Konsep Pemidanaan Di Indonesia.....	53
3.1.1	Teori Pemidanaan.....	54
3.1.2	Jenis Pemidanaan	59
3.1.3	Aspek pidana dan pemidanaan di Indonesia	64
3.2	Putusan rehabilitasi dalam konsep pemidanaan di Indonesia ...	68
 BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	81
4.2	Saran	82

DAFTAR BACAAN